

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN
MASYARAKAT YANG ADA DI DESA RANOLAMBOT KECAMATAN
KAWANGKOAN BARAT**

ALTER MAYKEL RURU

FLORENCE DAICY LENGKONG

JOORIE MARHAEN RURU

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Semua data yang disajikan sesuai dengan data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data berdasarkan observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dari berbagai sumber dianalisis dan dibuat kesimpulan. Permasalahan dalam penelitian ini terletak pada peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat yang kenyataannya pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa masih belum optimal, seperti yang telah diketahui bahwa ketersediaan dana dapat mendukung atau menghambat pembangunan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa peran pemerintah desa dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat di lihat dari indikator penelitian ini yaitu penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat desa. Peran Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan pendapatan desa salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), bidang usaha jasa sewa tenda dan pasar desa, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa. Diperlukan upaya yang lebih konkrit dari peran pemerintah desa dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu pelibatan seluruh warga desa dalam mengelola dan mengawasi kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah desa, khususnya pembentukan badan usaha milik desa.

Kata Kunci : Peranan, Meningkatkan, Perekonomian

Abstract

The purpose of this study was to study the role of the village government in increasing community income in Ranolambot Village, Kawangkoan Barat District. Type of qualitative descriptive research. All data presented are in accordance with primary and secondary data. Data collection techniques based on observation, interviews and documentation. Data obtained from various sources were analyzed and conclusions were drawn. The problem in this study discusses the role of the village government in increasing community income in Ranolambot Village, Kawangkoan Barat District, which increases the economic resources of the village community is still not optimal, as it is known that it requires funds that can be used to support or develop development. The findings of this study indicate the research of the role of the village government in improving community research in Ranolambot Village, Kawangkoan Barat District, seen from the indicators of this research are the implementation of government, implementation of development, community development, empowerment of rural communities. The role of the village government in making policies on increasing the village budget is one of them about the establishment of regionally owned enterprises (BUMDES), tent rental business services and village markets, but in implementing the policy it still needs improvement, so it cannot support increasing the amount of village funds. Greater assistance is needed from the role of the village government by using all available resources, namely the involvement of all villagers in the management and preservation of the budget that has been made by the village government, specifically making village-owned enterprises.

Keywords: Role, Improve, Economy

PENDAHULUAN

Rakyat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berdirinya suatu negara. Sebuah negara yang telah berdiri mempunyai keharusan untuk menjamin kesejahteraan rakyatnya, begitu juga dengan Indonesia. Pernyataan tersebut tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada alinea ke 4 “yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”.

Pengembangan ekonomi masyarakat bukan hanya tanggungjawab pemerintah pusat, melainkan juga tugas yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah desa. Apabila hanya dibebankan kepada pemerintah pusat, maka tingkat perekonomian di setiap daerah tidak akan merata. Daerah yang memiliki fasilitas penunjang seperti sarana prasarana serta sumber daya berkualitas akan memiliki taraf hidup yang baik. Berbeda dengan daerah yang terasing dan tidak memiliki infrastruktur pendukung untuk menunjang kehidupan masyarakat. Keadaan ini apabila dibiarkan akan menimbulkan kecemburuan serta kesenjangan antara orang kaya dan miskin.

Peran pemerintah desa dibutuhkan untuk memantau keadaan di setiap daerah dan memfasilitasi agar terjadi pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa. Pengembangan ekonomi yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup perlu melibatkan masyarakat secara keseluruhan, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di berbagai bidang. Hasil penelitian bahwa strategi pengembangan desa berperan penting untuk pembangunan dan meningkatkan ekonomi masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar orang di desa-desa yang dipilih harus sering melakukan dan memulai pembangunan mereka sendiri dalam strategi keuangan untuk pengembangan sosial ekonomi desa. Desa yang tidak memiliki dukungan dari pemerintah dan organisasi lokal

lainnya untuk memulai strategi dan mempromosikan kesempatan mengakses layanan keuangan akan rentan terhadap pengurangan keuangan di desa.

Kenyataannya pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa masih belum optimal, seperti yang telah diketahui bahwa ketersediaan dana dapat mendukung atau menghambat pembangunan. Kondisi keterbatasan dana yang ada mempunyai pengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang dilakukan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada beberapa tahun ke depan konsisten di bawah potensinya. Pertumbuhan dengan tingkat menengah itu tidak cukup menjawab persoalan pengangguran dan kemiskinan. Pengembangan sumber daya ekonomi masyarakat desa tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah.

Pemerintahan desa harus selalu memantau masyarakat. Potensi sumber daya yang ada di desa perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan penghasilan masyarakat. Tenaga kerja yang produktif perlu dibimbing agar bisa memiliki penghasilan yang meningkatkan kesejahteraan hidup.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan atau status. Kata peranan ini menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan sesuatu kelompok masyarakat. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka orang tersebut telah menjalankan suatu peranan. Peranan dan kedudukan saling tergantung satu sama lain. Tidak ada peranan tanpa kedudukan.

Abu Ahmadi (1982:256) menyebutkan bahwa peranan dalam ilmu sosial berarti suatu fungsi yang dibawakan seseorang ketika menduduki suatu posisi dalam struktur sosial tertentu. seseorang dapat memainkan fungsinya dengan menduduki jabatan tertentu.

Pengertian ini dikembangkan oleh paham interaksionis, karena lebih memperlihatkan konotasi aktif dinamis dari fenomena peranan. seseorang dikatakan menjalankan perannya manakalah ia menjalankan hak dan kewajiban yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari status yang disandangnya. setiap status sosial terkait dengan satu atau lebih peranan sosial.

Pemerintah desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Untuk mewujudkan peranan pemerintah desa tersebut maka perlu dan harus melakukan komunikasi dengan masyarakat supaya mereka mengerti tentang ide pembangunan sehingga dapat dan mau berpartisipasi dalam perencanaan, Pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan yang akan dan sedang dilakukan

Sistem ekonomi merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengatur segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai kemakmuran serta kesejahteraan bersama. Untuk menjalankan sistem ekonomi dengan efektif, diperlukan perangkat-perangkat ekonomi, seperti konsumen, produsen, pemerintah dan sebagainya.

Menurut Suhardjo, pengertian ekonomi desa adalah berbagai macam kegiatan mengandung unsur ekonomi yang dapat menjadi tumpuan bagi perputaran perekonomian di sebuah desa. Artinya kegiatan yang dimaksud tidak hanya sebatas pada profesi petani. pernyataan ini

dianggap sesuai dengan gambaran kondisi pedesaan saat ini. Dengan demikian berkembangnya teknologi, masyarakat desa tidak hanya berfokus pada profesi petani dan nelayan saja. Sebab berbagai macam sektor industry seperti pariwisata maupun industry kreatif, saat ini dapat menjadi tumpuan bago peningkatan perekonomian di sebuah desa.

Semangkin berkembangnya sektor ini, lapangan pekerjaan di sebuah desa menjadi lebih bervariasi. Menurut Sulistiyani (2004) bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya kekuatan kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya. pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

Pemerintah desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan mempunyai peranan dan juga kedudukan yang sangat penting dalam pemerintahan desa. Kepala desa merupakan pemimpin terhadap jalannya urusan pemerintahan yang ada di desa. Aparatu pemerintah desa sebagai pemimpin harus memiliki tanggungjawab atas perubahan yang akan terjadi, baik perubahan didalam masyarakat maupun perubahan sosial kemasyarakatan. Untuk itu pemerintah desa selaku kepala pemerintahan dalam usaha mengantisipasi perubahan-perubahan tersebut harus memiliki kemampuan berfikir dan berbuat secara rasional dalam mengambil keputusan yang akan terjadi ditengah-tengah masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini dirancang sebagai suatu jenis penelitian deskriptif analisa kualitatif. Menurut Scglegel (dalam sugiono, 1992), penelitian deskriptif merupakan suatu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan dan menyampaikan fakta-fakta dengan jelas dan teliti. Sedangkan menurut Maleong (2006), penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, secara holistik, dengan cara deskriptif pada suatu konteks khusus secara ilmiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Fokus dalam penelitian “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Yang Ada Di Desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat” menggunakan beberapa indikator dari Moleong (2006:4-5) yaitu :

- a. Penyelenggaraan pemerintah
- b. Pelaksanaan pembangunan
- c. Pembinaan kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan masyarakat desa

INFORMAN PENELITIAN

1. Kepala Desa (1 orang)
2. BPD (badan permusyawaratan desa) 1 orang
3. Kepala Jaga (1 orang)
4. Masyarakat Desa (2 orang)

HASIL DAN KESIMPULAN

a. Penyelenggaraan pemerintah
Penyelenggaraan Pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, di mana fungsi-fungsi manajemen senantiasa berjalan secara simultan, proporsional dalam kerangka pencapaian tujuan organisasi.

Fungsi-fungsi organik manajemen yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi merupakan sarana yang harus ada dan dilaksanakan oleh manajemen secara profesional dalam rangka

pencapaian sasaran dan tujuan organisasi secara efektif dan efisien.

Untuk mewujudkan adanya ketegasan dan konsistensi penyelenggaraan pemerintahan negara yang berdaya guna dan berhasil guna bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, maka kewenangan Daerah Otonom perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan untuk menghindari agar kewenangan tersebut tidak mengarah kepada kedaulatan.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dalam peningkatan perekonomian didesa Ranolambot yaitu pemerintah mendorong berkembangnya sektor ekonomi dengan melakukan pengembangan dan pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).

b. Pelaksanaan pembangunan

Pasal 81 UU Desa menyatakan bahwa pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pada ayat (4) pasal 81 ini ditegaskan bahwa pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Sedangkan pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Pasal 81

- (1) Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan

kearifan lokal dan sumber daya alam Desa.

- (4) Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan dalam peningkatan perekonomian di desa Ranolambot yaitu Setiap bulan BUMDES berkewajiban untuk menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada kepala desa. Dan tidak semua tanggungjawab kepala desa terhadap pembangunan ekonomi desa melalui BUMDes ditanggung oleh kepala desa saja bahkan Perangkat Desa, dan masyarakat juga ikut berpartisipasi dalam memajukan dan memperhatikan pelaksanaan BUMDes di desa Ranolambot Kecamatan Kawangkoan Barat agar meningkatnya perekonomian rakyat dan pembangunan desa. Dari pernyataan yang dinyatakan oleh direktur BUMDes juga berharap agar peningkatan BUMDes di Desa Ranolambot semakin meningkat dan mampu menciptakan masyarakat sejahtera. BUMDes desa Ranolambot melaksanakan simpan pinjam dengan menyediakan diantaranya; pengelolaan pasar, sewa tenda dan adanya organisasi lumbung desa.

c. Pembinaan kemasyarakatan

Pembinaan merupakan fungsi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Pembinaan bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat supaya makin lama makin baik dari sebelumnya.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan kemasyarakatan dalam peningkatan perekonomian di desa Ranolambot Pembinaan kemasyarakatan merupakan salah satu program pemerintah dalam meningkatkan serta mengelola lembaga dan sumber daya manusia agar lebih baik dan bekerja sesuai

dengan harapan. Pembinaan kemasyarakat dapat dilakukan dengan

berbagai cara baik melalui pelatihan, rapat, lomba, peringatan hari besar dan lain-lain. Di Ranolambot dilakukan kegiatan seperti pembentukan organisasi untuk dilakukan kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan. Kegiatan pembinaan lembaga kemasyarakatan merupakan upaya pembinaan dari pemerintah desa untuk meningkatkan kinerja lembaga di bawahnya agar dapat bekerja sesuai dengan yang diharapkan dan membantu pemerintah dalam memajukan desa. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya seperti rapat perangkat desa, karang taruna, PKK, keamanan, dan lain-lain. Adapun bentuk pembinaan lembaga kemasyarakatan ini dapat berupa pelatihan, rapat koordinasi, dan peningkatan sarana dan prasarana lembaga.

d. Pemberdayaan masyarakat desa

Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat (12), Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Selanjutnya jika dilihat berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat desa dalam peningkatan perekonomian didesa Ranolambot program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi merupakan program pemerintah untuk meningkatkan perekonomian desa. Program ini mencakup pemberdayaan BUMDes seperti lumbung desa, pasar lokal, sewa tenda serta penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Bentuk program pemberdayaan ini dapat berupa pelatihan, workshop, pemodalan/permodalan, bantuan alat produksi, peningkatan sarana/prasarana dan

lain-lain. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka penelitian tentang peran pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan di desa Ranolambot, yaitu:

1. Peran Pemerintah desa dalam membuat kebijakan tentang peningkatan pendapatan desa salah satunya adalah kebijakan tentang pembentukan badan usaha milik desa (BUMDES), bidang usaha jasa sewa tenda dan pasar desa, namun dalam implementasinya kebijakan tersebut masih mengalami kendala, sehingga belum dapat secara maksimal meningkatkan pendapatan desa.
2. Peran pemerintah desa dalam strategi peningkatan pendapatan desa, sesuai dengan hasil penelitian pemerintah desa belum melakukan strategi tertentu dalam menunjang peningkatan pendapatan desa, ada beberapa strategi yang hendak ditawarkan sebagai salah satu solusi yaitu peningkatan home industry bagi masyarakat desa, dimana ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah desa, namun hal ini belum juga dilaksanakan oleh pemerintah desa.
3. Peran pemerintah desa sebagai alat komunikasi antar lembaga pemerintah desa itu sendiri dan masyarakat, sesuai dengan hasil penelitian, komunikasi yang terjadi belum cukup efektif untuk menjadi sarana sosialisasi pemerintah desa, dan belum dapat menyatukan persepsi antar pemerintah desa dengan masyarakat, khususnya dalam pembentukan badan usaha desa, yang dimaksudkan untuk peningkatan pendapatan desa.

4. Peran pemerintah desa dalam penyelesaian konflik yang terjadi di desa, sesuai dengan hasil penelitian tidak ada konflik besar yang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat desa, selama ini yang terjadi adalah sikap pro dan kontra dari masyarakat mengenai pembentukan badan usaha milik desa tersebut.

Saran

1. Diperlukan upaya yang lebih konkrit dari peran pemerintah desa dengan menggunakan seluruh sumber daya yang ada, yaitu pelibatan seluruh warga desa dalam mengelola dan mengawasi kebijakan yang telah di buat oleh pemerintah desa, khususnya pembentukan badan usaha milik desa.
2. Perlunya penyusunan strategi yang dilakukan pemerintah desa dalam upaya peningkatan pendapatan desa, seperti menggali potensi desa melalui keterampilan yang dimiliki oleh penduduk desa, melalui mediasi dan fasilitasi yang dilakukan oleh pemerintah desa.
3. Diperlukan adanya komunikasi yang efektif antar lembaga pemerintah desa, BPD dan masyarakat, agar tercipta kesepahaman dan penyatuan persepsi sehingga tidak terjadi resistensi di masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa, seperti melakukan sosialisasi, maupun membuka forum dialog antar pemerintah desa dengan masyarakat di masing-masing dusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi, Skematika, Teori, dan Terapan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara
- Aibdu Ahmadi,A, 1982. *Psikologi Sosialis*. Surabaya: PT. Bina Ilmu

Dortea Nova Lobbu . 2017. “*peranan pemerintah dalam pembangunan di desa dobap kecamatan tutuyan kabupaten bolaang mongondow timur*”. Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Michael Rojer Liow. 2015. “*Peran Pemimpin Informal dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa*”

Narwoko, J. D. dan Bagong, S. 2006. *Sosiologi Teks Penagantar*. Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Nurcholis, H. 2005. *Teori dan Peraktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo

Sagian, S. P. 2004. *Manajemen*. Yogyakarta: Liberti.

Sedarmayanti. 2004. *Good governance (Kepemerintahan Yang Baik)*.

Sulistiyani. 2004. *Tentang Teori Pemberdayaan Masyarakat*.

Soekanto, S. 1978. *Sosiologi suatu pengantar*. Jakarta: PT.Raja grafindo Persada.

Sugiyono. 2007. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta

Thoba, M. 1995. *Kepemimpinan dalam Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Qonitah M. Mahmudah. 2017. “*peran pemerintah desa dalam meningkatkan ekonomi kemasarakatan di desa duwet kecamatan ngawen kabupaten klaten*”.

hetronap kogoya 2015. “*peranan kepala desa dalam pembangunan masyarakat desa di desa wambo Kecamatan Gupura Kabupaten Lanny Jaya*”.

Sumber Lain :

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah Desa